

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

Senin
02 Desember 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

APBD Baubau 2025 Ditetapkan Jadi Perda, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp 948,56 Milyar

Dr Rasman Manafi: Pasca Pilkada
Pemkot Harmonisasi Hubungan
Perbedaan Melalui Fortrad Yang
Diinisiasi Dispora Baubau



Laporan: Amat Jr, Baubau Post, Durasi Times

BAUBAU, BP-Setelah melewati proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati bersama, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025 dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada sidang Paripurna DPRD Kota Baubau Jumat malam (29/11/2025).

Gambaran umum mengenai pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 yakni untuk Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar

Lanjutkan ke Hal: 7



eksebisi tarik tambang antara panitia Fortrad dengan OPD Baubau di Kotamara dihadiri langsung PJ Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Baubau tahun 2024 baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra maupun Pemilihan Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Baubau telah selesai dilaksanakan dan tentunya menyisakan semangat yang kendor karena ada segregasi di beberapa komunitas. Karena itu,

Lanjutkan ke Hal: 7

Dr. H. MUK. RASMAN MANAFI, SP, M.Si
PJ. Wali Kota Baubau

LA ODE ASWAD, S.Sos., M.Si | Dr. KHORRAB TADIK, S.K.R.S
PJ. Sekda Kota Baubau | Walikota Kota Baubau

FESTIVAL OLAHRAGA TRADISIONAL (FORTRAD)
TINGKAT KOTA BAUBAU 2024
Baubau, 29 November s.d 3 Desember 2024
Ayo Berolahraga - Bersatu Kita Juara

Sah, Paduka Yang Mulia H La Ode
Muhammad Kariu Menjabat Sultan
Buton ke 41



Pj Walikota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi hadir pelantikan Sultan Buton ke 41 PYM H La Ode Muh. Kariu

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Setelah melalui proses yang cukup Panjang mulai dari prosesi Tiliki,

Buataka Katange, Kambojai, Fali, Sokaiyana Pau sampai kepada prosesi Bulilingiana Pau atau

Lanjutkan ke Hal: 7



SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post
(www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi
per Tanggal 30 Desember 2022



APBD Baubau 2025 Ditetapkan Jadi Perda, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp 948,56 Milyar

948,56 milyar rupiah, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 128,72 milyar rupaiah atau 13,57 persen dari pendapatan daerah, Pendapatan Transfer (dana Transfer Pusat dan Dana Transfer antar Daerah) sebesar 805,31 milyar rupiah atau 84,90 persen dari pendapatan daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 14,53 milyar rupiah atau 1,53 persen dari pendapatan daerah. Dari data tersebut proporsi terbesar pendapatan daerah dari yakni berasal dari Pendapatan Transfer.

Kemudian, untuk Belanja Daerah direncanakan sebesar 945,56 milyar rupiah, yang dialokasikan untuk belanja: (a) Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan

sosial, (b) Belanja Modal yang terdiri dari belanja modal tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja modal gedung dan bangunan, Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, Belanja modal aset tetap lainnya (c) belanja Tidak Terduga.

Sementara untuk Pembiayaan Netto dalam APBD Tahun Anggaran 2025 devisit sebesar 3 milyar rupiah, merupakan selisih penerimaan antara pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Yang mana Penerimaan daerah direncanakan sebesar 17 milyar rupiah yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 20 milyar rupiah yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Dae-

rah (BPD) Sultra.

Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si dalam sambutannya pada sidang Paripurna DPRD Kota Baubau menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran, Fraksi-Fraksi dan Komisi- Komisi DPRD Kota Baubau yang telah menjalankan tugasnya dengan memberikan pandangan, saran, usul, masukan dan rekomendasi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Menurut orang nomor satu di Kota Baubau ini, APBD

merupakan jembatan dalam rangka upaya Pemkot Baubau mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 dan arahan RPJPD 2025-2045 serta untuk menjawab isu-isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan untuk mencapai visi Baubau 20 tahunan sebagai Hub Maritim di Sulawesi yang Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan yang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan periode masa bakti kepala Daerah yang menginginkan agar Kota Baubau maju dalam berbagai dimensi pembangunan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)

Sah, Paduka Yang Mulia H La Ode Muhammad Kariu Menjabat Sultan Buton ke 41

pelantikan Sultan Buton pada Jumat (29/11/2024), akhirnya Yang Mulia (YM) Drs H La Ode Kariu sah menjabat sebagai Sultan Buton atau Laki Wolio. Prosesi Bulilingiana Pau atau pelantikan Sultan Buton La Ode Kariu dihadiri langsung Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) YM Karaeng Turikale VIII Maros Brigjen (Pol) Dr AA Mapparesa, MM, M.Si bersama sejumlah Raja dan Sultan Nusantara termasuk raja-raja yang ada di Sulawesi Tenggara tergabung dalam FSKN dan juga Raja Timor yang sekarang masuk dalam negara Timor Leste.

Dalam sambutannya, Ketua umum FSKN YM Karaeng Turikale VIII Maros Brigjen (Pol) Dr AA Mapparesa, MM, M.Si memberikan dukungan sepenuhnya kepada La Ode Kariu yang sudah sah menjabat sebagai Sultan Buton dan kemudian menjadi anggota FSKN.

“Paduka yang Mulia Sultan Bu-

ton atas nama seluruh Raja dan Sultan kami menyampaikan ucapan selamat, ucapan tersyukur atas amanah yang mulia peroleh dari seluruh kerabat kita seluruh masyarakat yang ada di Kesultanan maupun di Pulau Buton ini. Kami yakin kita adalah partner strategis pemerintah khususnya di dalam pelestarian pemajuan dan pewarisan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh para leluhur untuk diwariskan kembali secara positif nilai-nilai ini kepada generasi penerus kita,” ujarnya.

YM AA Mapparesa mewakili Raja dan Sultan yang ada di Nusantara ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si sebab pihaknya sangat paham betul bagaimana proses yang dilakukan baik melalui proses adat maupun melalui pemerintah. Ini suatu langkah positif dari Pemkot Baubau untuk membuat warga masyarakat tetap ber-

satu karena yang paling mahal adalah persatuan. Begitu pula dengan apa yang dilakukan dengan pelantikan Sultan Buton sebagai puncak acara yang dilaksanakan pada hari Jumat yang merupakan hari yang sangat berkah dilaksanakan secara Islami di masjid dan dilanjutkan secara adat di Baruga.

“Inilah salah satu prosesi adat yang menurut catatan kami lengkap dan disaksikan oleh pemerintah setempat. Insya Allah Yang Mulia Sultan Buton tetap berada di dalam FSKN Nusantara dan kami berharap pula seluruh kerabat kami di kesultanan maupun seluruh warga Baubau mohon dukungannya kiranya kita semua ini bisa melestarikan dan mewariskan budaya kita secara baik kepada generasi penerus kita, Dan hari ini Kesultanan Buton dan Pemkot Baubau telah mengukir sejarah bahwa inilah pelestarian adat dan pemajuan budaya yang menjadi mercusuar untuk nusantara kita,” tutupnya. (*)

Dr Rasman Manafi: Pasca Pilkada Pemkot Harmonisasi Hubungan Perbedaan Melalui Fortrad Yang Diinisiasi Dispora Baubau

Pemkot Baubau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Baubau mengharmonisasi hubungan perbedaan dengan menggelar Festival Olahraga Tradisional Tingkat Kota Baubau Tahun 202 di Kotamara, Jumat (29/11/2024).

Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membuka Festival Olahraga Tradisional tersebut memberikan apresiasi kepada Dispora yang menggelorakan semangat olahraga sekaligus mengharmonisasi kembali hubungan yang belum harmonis. “Saya apresiasi kepada Dispora Pak Tasdik saya sangat memahami siapa yang masih kendor semangatnya untuk mengharmonisasi paska pilkada dan yang hadir adalah orang-orang yang optimis untuk mendorong

harmonisasi itu sementara yang tidak hadir mungkin ada kegiatan lain misalnya pembahasan DPRD. Jadi kita sangat berharap untuk harmonisasi kota,” ujarnya.

Ditambahkan, Festival olahraga tradisional ini menjadi ajang untuk berinteraksi, ajang membangun menjaga silaturahmi sebagai masyarakat Kota Baubau. Hal ini perlu disampaikan sebab Pelaksanaan Pilkada Pilgub dan Pilwali sudah selesai dan juga menyadari sebagai makhluk setiap 5 tahun akan ada seperti itu dan setiap 5 tahun akan ada pemilahan-pemilahan masyarakat baik yang berbeda pilihan, berbeda pandangan dan ini lumrah sebab namanya juga pemilihan masyarakat yang terpilih dan yang tidak tercapai

keinginannya.

Karena itu, Pemkot Baubau terus melakukan upaya dengan mengharmonisasi dan mensinergikan terus agar bisa berefek pada pembangunan kota sehingga kegiatan Festival Olahraga Tradisional ini cepat dilaksanakan dan ini akan mendorong pelaksanaannya sampai kecamatan meskipun tidak usah terlalu mewah tetapi bisa menghadirkan orang untuk berinteraksi.

“Kita ini punya wilayah yang tidak terlalu besar kalau kita berangkat dari ujung kota ke ujungnya lagi yang paling jauh paling cuma 2 jam perjalanan sudah sampai itu. Mungkin dengan kecepatan dua jam itu artinya sebenarnya interaksi kita mudah sekali apalagi sekarang sudah ada internet,

informasi dari kampeonah itu hari ini bisa di tahu juga saat itu juga di Kato Bengke atau Sulaa. Jadi, ayo saya selalu mengajak ibu bapak semua bahwa perbedaan itu harus ada karena kalau sama semuanya itu tidak menarik juga tidak nyaman pasti,” ungkapnya.

Ditambahkan, Baubau memang beragam orangnya bahkan dibentuk oleh orang yang beragam dan untuk menjaga keberagaman itu maka harus membuat media seperti Festival Olahraga Tradisional untuk mempertemukan orang yang beragam sehingga toleransi terbangun silaturahmi terbangun dan yang cukup penting adalah terbangun persaudaraan sebagai anak negeri sebagai orang buton sebagai orang Baubau. (*)

Pemkot Baubau Komitmen Atasi Masalah Gizi

BAUBAU, BP- Mengatasi masalah gizi sebagai langkah dasar untuk menciptakan generasi penerus yang kuat dan berpotensi menjadi pilar kemajuan bangsa dengan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Demikian dikatakan Plh Sekda Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si saat mewakili Pj Wali Kota Baubau pada pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SDN Wangkanapi Rabu (20/11/2024).

Menurut Asmahani, salah satu program dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo Subianto adalah termasuk penurunan angka stunting menjadi salah satu fokus dalam upaya perbaikan gizi anak Indonesia terkhusus anak Indonesia Kota Baubau. Oleh sebab itu, pemberian makan bergizi pada anak sekolah dasar adalah salah satu cita-cita visi pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Asmahani mengharapkan, mulai dari penyediaan akses pangan bergizi,

peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak sehingga program edukasi gizi kepada masyarakat khususnya masyarakat Indonesia. “Mari bersama-sama mendukung program perbaikan gizi bisa terlaksana dengan baik di Kota Baubau sehingga harapan kita dapat terwujud menciptakan generasi bangsa sehat, kuat, berdaya saing dan berakhlak mulia,” harapnya.

Ditempat yang sama, Kadis Kesehatan dr Lukman, SPPD mengungkapkan, pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri Wangkanapi untuk anak kelas 1 dan jumlah paket yang diberikan ada 50. Dalam satu paket hari ini terdiri 200-300 Kkal dengan ada sumber protein, karbohidrat, lemak dan juga serat ditambah susu. Tetapi pihaknya melihat tekstur kontur makanan juga kualitas makanan karena ini diperuntukkan untuk anak-anak SD.

“Kemarin telah diinisiasi oleh bapak Wali Kota dan leading sektornya dari Dinas Pendidikan. Hari ini dari Dinas Kesehatan dan bukan tidak mungkin bapak Wali Kota men-

gajurkan jika ada stakeholder lain ingin mencoba bisa mengkoordinasikan ke Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan. Boleh terbuka bagi siapa saja, makin banyak simulasi makin banyak informasi yang kita dapat yang bisa kita analisa untuk perbaikan sistem ini. Jadi begitu masuk 2025 kita sudah tidak ada kendala dan sudah banyak informasi untuk diformulasikan untuk pemberian makan bergizi gratis ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Eko Prasetyo, ST, MM mengungkapkan, terkait soal pemenuhan standarisasi sarana dan prasarana di sekolah pihaknya telah beranjang ke beberapa sekolah dan salah satunya di SD Negeri Wangkanapi untuk bagaimana standarisasi sarana dan prasarana mulai dari pemenuhan meja kursi yang mempunyai standar yang bagus.

“Alhamdulillah di penganggaran perubahan kita akan coba memenuhi itu artinya masalah kita cukup besar tetapi akan kita coba mengurai secara perlahan. Kita berharap di

Prabowo Kunjungi Abu Dhabi Sabtu, Pulang ke Indonesia Minggu



Presiden Prabowo akan menutup lawatan ke luar negeri dengan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (23/11).

Laporan: Hadi

JAKARTA-Presiden Prabowo Subianto akan menutup lawatan ke luar negeri dengan berkunjung ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (23/11).

"Saya rasa saya akan ke Emirat, Abu Dhabi, tanggal 23 [November]," kata Prabowo di London, Inggris di kanal

YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (22/11).

Prabowo tak merinci akan membahas apa saja dengan pimpinan UEA nantinya. Namun, kata dia, Indonesia dan UEA merupakan sahabat dekat.

"Banyak yang dibahas, ya," tuturnya.

Usai lawatannya ke Abu Dhabi, Prabowo akan pulang ke Indonesia pada Minggu

(24/11). "Langsung pulang [tanggal] 24 saya sudah di Jakarta," lanjutnya.

Saat ini, Prabowo berada di Inggris untuk menggelar beberapa pertemuan dengan para pemimpin di negara tersebut. Prabowo mengaku masih memiliki beberapa pertemuan terbatas di London.

Ia sempat bertemu dengan Raja Charles III di Istana Buck-

ingham serta bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer di Downing Street, London.

Prabowo memulai lawatannya luar negeri sejak 8 November 2024. Ia mengawali kunjungannya ke China untuk bertemu Presiden China Xi Jinping. Setelahnya, bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di AS. (*)

Komisi X DPR: Penghapusan PPDB Zonasi Harus Dengar Beragam Aspirasi



ilustrasi. Komisi X DPR menegaskan warga dan stakeholder terkait harus dimintai pendapat soal penghapusan PPDB zonasi

JAKARTA-Komisi X DPR menilai penghapusan sistem zonasi sekolah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan aspirasi semua pihak. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ingin kebijakan yang diputuskan benar-benar berdampak positif bagi pendidikan di Indonesia.

"Kami berpandangan sebaiknya kita mendengar pendapat

publik dan stakeholder, dengan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dinas-dinas pendidikan, guru, orang tua siswa, dan pemerhati pendidikan, untuk membahas efektivitas zonasi serta keluhan masyarakat," kata Hetifah dikutip dari Antara, Jumat (22/11).

Hetifah menjelaskan sistem PPDB zonasi awalnya diterapkan

mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dan mencegah diskriminasi dalam dunia pendidikan.

Namun, pelaksanaan sistem itu menghadapi tantangan, seperti ketidaksiapan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengeksplorasi alternatif jika sistem zonasi benar-benar dihapus.

"Jika sistem zonasi

dianggap tidak efektif diperlukan alternatif yang lebih adil, seperti seleksi berbasis nilai (PPDB jalur prestasi diperkuat) atau dengan tambahan kuota afirmasi bagi siswa dari keluarga tidak mampu (PPDB jalur afirmasi)," ucapnya.

Komisi X DPR, kata Hetifah, mendorong pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan. Ia berpendapat masalah utama yang memicu kritik terhadap zonasi adalah ketimpangan kualitas antar-sekolah. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku telah meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk menghilangkan sistem PPDB zonasi.

Dia menekankan pendidikan adalah kunci generasi emas dan Indonesia Emas 2045. Karena itu,

Wakil Menteri Pendidikan: Sistem PPDB Zonasi Akan Disempurnakan

JAKARTA-Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menyatakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan diperbaiki dan disempurnakan.

Hal ini ia sampaikan merespons permintaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mau menghapus sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru.

"Perlu ada beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Namun, kami belum sampai pada kesimpulan final," kata Atip kepada CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Atip menuturkan belakangan ini, Kemendikdasmen telah melakukan kajian cukup komprehensif soal sistem zonasi dalam penerimaan siswa. Kemendikdasmen telah mengumpulkan berbagai

pihak untuk mendiskusikan kebijakan ini.

"Kami mengundang para kepala dinas, pakar, dan pihak-pihak terkait lainnya," ucapnya.

Gibran sebelumnya mengaku telah meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti untuk menghapus sistem PPDB. Ia menjelaskan dalam satu rapat koordinasi dengan para kepala dinas pendidikan, ia telah meminta mereka agar memprioritaskan persoalan pendidikan di Indonesia.

"Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan 'Pak ini zonasi harus dihilangkan'," kata Gibran dalam pidatonya di Pembukaan Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (21/11).

Dikutip di laman resmi Kemendikbud,

sistem zonasi diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

Di dalam Pasal 16 aturan ini disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah..(hadi)

PKB Minta Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Laporan: Listar

JAKARTA-Ketua DPP PKB Dita Indah Sari meminta pemerintah menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

Ia menyoroti situasi ekonomi saat ini di mana daya beli masyarakat sedang menurun dan PHK yang mencapai hampir 65 ribu.

"PKB minta agar rencana PPN 12 persen per 1 Januari itu ditunda dulu, karena situasi daya beli masyarakat sedang menurun. PHK mencapai hampir 65 ribu," kata Dita saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/11).

Ia memahami kenaikan itu memang amanat dari UU HPP (Harmonisasi Peraturan Pajak) tahun

2021.

Namun, kata dia, ada klausul dalam UU itu yang memperbolehkan pemerintah dan DPR menyesuaikan tarif PPN itu, dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"Boleh naik, boleh turun, dengan batas atas dan bawahnya (15 persen dan 5 persen). Ruang untuk meninjau kembali jelas ada. Jadi bukan harga mati harus naik," ujarnya.

Pemerintah akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Pemerintah berda- lah menjalankan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR memang menetapkan

kan PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Meski mendapatkan tentangan di publik, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belum ada pembahasan kenaikan PPN akan ditunda.

Menurutnya, meski banyak perdebatan menaikkan pajak di tengah pelemahan daya beli, namun di satu sisi APBN sebagai shock absorber harus dijaga kesehatannya.

"Tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya. Karena APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon dalam episode global crisis financial. Countercyclical tetap harus kita jaga," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Rabu (13/11).(*)

penting untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses pendidikan.

"Kemarin pada waktu rakor dengan para Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri

Pendidikan, 'Pak ini zonasi harus dihilangkan'," ujar Gibran dalam acara Tanwir I PP Pemuda Muhammadiyah, di Jakarta Pusat, Kamis (21/11).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga

menyampaikan pentingnya mengajarkan anak-anak muda pelajaran coding, programming, hingga digital marketing. "Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain," katanya. (*)

Resmikan Mess Pemda Sultra di Makassar, Pj Gubernur ABR: Jaga Dengan Baik Aset Kita



Pewartu: Mashuri

SULSEL, BP-Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, secara resmi meresmikan Mess Pemerintah Daerah (Pemda) Sultra yang berada di Kota Makassar, Rabu (20/11/24).

Acara diawali laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra, Martin Efen-di Patulak, yang menjelaskan bahwa Gedung mess ini dibangun semasa Gubernur Ali Mazi pada tahun 2019, telah melalui 6 tahapan pembangunan hingga akhirnya hari ini dapat diresmikan oleh Pj Gubernur, Andap, mess ini terdiri dari 6 lantai dengan total kamar sebanyak 32 kamar.

Pj Gubernur saat meresmikan Mess Pemda Sultra di Kota Makassar menyampaikan bahwa dalam prosesnya telah melalui review dari Inspektorat sehingga aset ini diresmikan.

Lebih lanjut, Pj Gubernur menegaskan bahwa pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mendukung kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN),

serta mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan nilai investasi sebesar Rp36.467.396.000, Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fasilitas ini seraya mengingatkan agar Mess ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bebas dari praktik negatif seperti korupsi, perjudian, prostitusi, atau penyalahgunaan lainnya.

“Mess ini bukan tempat untuk hal-hal yang tidak bermoral. Pastikan fasilitas ini terawat baik, aman, dan bebas dari masalah hukum, 36 miliar adalah angka yang tidak sedikit dan itu adalah uang rakyat, jangan sampai ada penyimpangan,” tegasnya.

Selain itu, untuk pemanfaatan aset yang optimal, Pj Gubernur juga mengingatkan kepada stakeholder terkait untuk memedomani PP 27 tahun 2014 tentang siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam mengelola aset-aset daerah, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan anggaran, pemanfaatan hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dengan pengelo-

laan yang transparan dan akuntabel, ke depannya diharapkan tidak ada lagi temuan berulang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai penutup, Pj Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Sultra dan Pemkab/ Pemkot di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk memastikan mess ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Mess Pemda ini adalah wajah Sulawesi Tenggara di Sulawesi Selatan. Rawat dan manfaatkan mess ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadikan ini sebagai tempat tinggal yang nyaman selama bertugas di Makassar, sekaligus menjadi pusat promosi daerah kita,” harapnya.

Setelah memberikan sambutan dan arahnya, Pj Gubernur secara resmi meresmikan Mess Pemda Sultra dengan ditandai penekanan hand sign pada layar dan pemotongan pita.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu, 20 November 2024 Saya meresmikan Mess Pemda Sultra di Makassar,” un-

gaknya.

Selain itu Pj Gubernur dalam kesempatan juga meninjau secara langsung Gedung yang diresmikan dengan meninjau masing-masing kamar serta fasilitas yang dimiliki, antara lain ruang rapat dan ruang kerja atau working space.

Dalam tanggapannya kepada awak media, Pj Gubernur menyatakan bahwa Mess Pemda di Makassar merupakan langkah strategis untuk mendukung efektivitas tugas ASN yang bertugas di luar daerah, khususnya di Sulsel.

“Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan ASN yang bertugas di Makassar dapat bekerja dengan lebih optimal dan efisien. Selain itu, fasilitas ini juga dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang dapat menunjang pembangunan di Sulawesi Tenggara,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Prov. Sultra, Plh. Asisten I Setda Prov. Sulsel, Pimti Pratama Tk. I Pemprov Sultra, serta Sekda Kota Makassar. (*)

Terapkan Analisis Standar Belanja, Pemprov Sultra Terus Lakukan Perbaikan Sejumlah Aspek



Pewartu: Amran

KENDARI, BP-Mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio., M.Hum., Ph.D mengungkapkan apresiasi dan terimakasih kepada kepala seluruh Pimpinan OPD, atas komitmen dalam mendukung akuntabilitas tata kelola pemerintahan lingkup Pemrov Sultra, terutama terkait implementasi dan tindak lanjut Analisis Standar Belanja (ASB).

Hal tersebut diungkapkan Sekda Sultra saat membuka secara resmi rapat koordinasi Analisis Standar Belanja (ASB) Provinsi Sultra Tahun 2025, Selasa (19/11/2024), di Kendari. Bahkan meskipun telah menerapkan Analisis Standar Belanja, Pemrov Sultra akan terus melakukan perbaikan sejumlah aspek.

“Namun yang menjadi penekanan bagi kita semua adalah kita mampu menjadi pembuat sejarah tentang tata kelola pemerintahan kita, khususnya dalam aspek perencanaan dan penganggaran, karena sudah mampu menerapkan ASB, walaupun dalam perjalanan penerapannya masih ada aspek-aspek yang harus terus dipenuhi dan disesuaikan kembali,” terangnya.

Dia melanjutkan, yaitu penyesuaian standar harga satuan pada aplikasi SIPD RI, penyesuaian terhadap regulasi TKDN, dan yang menjadi tanggung jawab selanjutnya adalah penyusunan ASB non fisik.

Berkaitan dengan upaya perbaikan itu juga, Sekda Sultra kembali memberikan apresiasi kepada selu-

ruh OPD lingkup Pemrov Sultra, karena telah menyempatkan hadir ditengah kesibukan aktivitas akhir tahun yang cukup padat, untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan tersebut.

“Rapat koordinasi ASB ini sangat penting untuk kita semua, karena kita dituntut harus mampu menyelenggarakan setiap kegiatan, dengan biaya yang efisien. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah,” katanya.

Selanjutnya, masih dia, PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah pada bagian belanja daerah di tetapkan bahwa “analisis standar belanja” standar harga satuan dan standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran, dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD.

“Yakinlah, aspek-aspek yang belum terpenuhi dan kendala lainnya, atas semangat teman-teman tim penyusun ASB, semua dapat berjalan dan terselesaikan, apabila dibutuhkan, kita akan bekerja sama dengan universitas yang berkompeten dalam penyusunan ASB,” ujarnya.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Sekda Sultra berharap agar rapat tersebut bisa menghasilkan usulan perubahan dan penyesuaian dari OPD yang sangat dibutuhkan pada penyusunan dokumen ASB, sehingga output dan outcome dari rapat koordinasi menciptakan pemahaman yang sama dalam penjabaran ASB fisik dalam kertas kerja perencanaan dan penganggaran tahun 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemrov Sultra, peserta rapat koordinasi Analisis Standar Belanja, dan berbagai pihak terkait lainnya. (*)

Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide Hadiri peringatan hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52



Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Tengah menggelar peringatan hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52, bertempat di gedung kesenian Lakudo, Rabu (30/7/2024).

Peringatan HKG PKK Kabupaten Buton Tengah dihadiri Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, Pj Sekda, La Sariipi, Forkopimda, para Kepala OPD, Pj Ketua TP PKK dan seluruh kader, sejumlah Camat dan tamu undangan.

Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide dalam sam-

butannya pertama menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran TP PKK Kabupaten Buton Tengah bersama para pengurus dan anggota dimanapun berada, atas peringatan HKG PKK ke-52 tahun 2024.

Secara pribadi kata Pj Bupati, saya sangat setuju dengan tema yang diangkat dalam HKG Ke-52 tahun 2024," bergerak bersama PKK wujudkan keluarga sejahtera bersama Indonesia maju".

"Saya kira tema ini sangat tepat di mana hari ini perlu bergerak bersama. Tentu bergerak ber-

sama PKK kita harapkan ibu-ibu PKK bisa menjadi moto penggerak lokomotif dalam pelaksanaan program pembangunan baik di tingkat daerah, kecamatan, maupun tingkat desa/kelurahan",ujarnya.

Hari ini kita dihadapkan berbagai keadaan dan permasalahan, melalui momen HKG PKK kita harapkan betul-betul bisa mendorong atau meningkatkan motivasi kita untuk mengatasi berbagai permasalahan.

Dalam kegiatan ini saya berharap agar dalam program kerja PKK Buton Tengah betul-betul

bisa berkolaborasi, bergerak bersama dengan OPD.

"Peringatan HKG PKK ke-52 mari kita jadikan momentum untuk merubah pola-pola pikir kita yang selama ini sifatnya hanya formalitas, agar HKG PKK punya makna yang gemilang di masyarakat. Kesatuan gerak PKK yang kita peringati hari ini, kita jadikan momentum untuk bersinergi antara OPD dan TP PKK, kita bisa akselerasi terhadap percepatan-percepatan pembangunan di daerah",pungkasnya. (*)

Sekda Buton Pimpin FGD Pemanfaatan SDI Kabupaten Buton



Pewartar: Rahim

BUTON, BP-Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Asnawi Jamaluddin S.Pd.,M.Si memimpin Focus Group Discussion (FGD) implementasi pemanfaatan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Buton di Aula Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Rabu 17 Juli 2024.

Turut hadir Asisten Pemerintahan Kesra dan Setda Kabupaten Buton, Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BPS kabupaten Buton, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton dan Para Camat Se-Kabupaten Buton.

butan Buton juga inovasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik untuk membantu kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton.

Kepala BPS Kabupaten Buton Zablin, SST., M.Si mengatakan Indonesia sejak bulan Maret 2024 telah mendaftarkan diri di organisasi ekonomi negara maju, salah satu menjadi tahapan menjadi anggota penuh dalam mengikuti akses dengan total komisi dipersiapkan sebanyak 26 komisi dan di antaranya yang termaksud dalam BPS itu yaitu komisi statistik dan pemanfaatan statistik.

menyelesaikan masalah bukan menambal pekerjaan dan harusnya data diperoleh dari proses yang sudah berjalan sehingga data tinggal ditertibkan setiap adanya perubahan data.

Ia berharap kedepan dengan informasi yang kita hasilkan hari ini dapat menjadi langkah awal kita dalam menyelesaikan segala program yang ada sehingga dapat membantu kinerja pemerintah daerah Kabupaten Buton.

Pada kesempatan ini juga,statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Amin S.E(*)

Kostantinus Bukide Evaluasi Kinerja Kepala Desa di Aula Kantor Bupati Buton Tengah



Pewartar: Rahim

BUTENG, BP-Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, di dampingi Pj Sekda, La Sariipi, Kepala BKPSDM, Wujududin, Kepala Inspektor-

at, La Ance Paulus, Kadis BPMD, Armin, melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah Pj Kepala Desa, di aula kantor Bupati Buteng bumi prajalabungkari, Senin (29/7/2024).

Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Evaluasi di lakukan dengan mengkaji berbagai aspek,

termasuk pengelolaan anggaran desa, pelaksanaan program-program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.

"Kita ingin memastikan bahwa setiap desa mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan program pembangunan dengan efektif dan efisien",ujar Pj Bupati.

Evaluasi ini akan dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja setiap desa di Buton Tengah. (*)

PEMERINTAH DAERAH KOTA BAUBAU DINAS PARIWISATA

Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Dr. H. Muh. Rasman Manafi, SP, MSi
Pj. WALIKOTA BAUBAU

LM. Idrus Taufiq Saidi
Kadis

Lantik Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu, Menkes Menitipkan Tiga Pesan



peraturan tersebut, keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan. Pelantikan anggota Kolegium Kesehatan

Indonesia Pengganti Antarwaktu tersebut karena ada pengunduran diri dari anggota Kolegium Obstetri dan Ginekologi, sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia,

periode 2024-2028. Anggota Kolegium Kesehatan Indonesia yang dilantik sebagai anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu masa bak-

ti 2024-2028 adalah Dr. dr. Ivan Rizal Sini, GDRM, MMIS, FRANZCOG, SpOG, yang berasal dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi. (*)

Laporan: Yeti

JAKARTA, BP- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melantik dan mengambil sumpah anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu masa bakti 2024-2028 di Ruang Kartini, lantai dua, Gedung dr. Adhyatma, Selasa (19/11/2024).

Dalam sambutannya, Menkes Budi menyampaikan tiga pesan penting mengenai pelayanan kesehatan kepada anggota kolegium yang baru dilantik. Pesan tersebut yakni, akses pelayanan yang mudah, kualitas pelayanan yang baik, dan harga yang terjangkau.

“Saya ingin titip pesan mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses yang mudah, kualitas yang baik, harga yang terjangkau, atas pelayan-

an kesehatan. Tiga hal ini adalah misi yang saya ingin capai untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Tugas kolegium adalah menjadikan ketiga misi ini agar benar-benar bisa terealisasi ke seluruh pelosok Indonesia,” kata Menteri Budi.

Kolegium harus lebih agresif untuk menurunkan kompetensi ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini agar tugas kolegium sebagai pengampu dapat memberikan ilmu yang sebanyak-banyaknya untuk menjadikan pelayanan kesehatan merata ke seluruh pelosok Indonesia.

“Saya juga ingin memastikan bahwa kualitasnya terjaga. Kolegium harus memastikan bahwa dokter yang melakukan pelayanan yang sama kualitasnya dan semua kota yang memiliki alat yang sama harus bisa

melakukan tindakan yang sama,” ucapnya.

“Bagaimana kita mengejar kualitas pelayanan yang merata di seluruh Indonesia adalah tugas kolegium juga sebagai pengampu. Jadi, bukan hanya bisa tahu melakukan, tetapi bisa melakukan dengan konteks yang sama,” tambah Menkes.

Menkes Budi menutup sambutannya dengan memberikan ucapan selamat kepada anggota kolegium yang baru saja dilantik.

Pelantikan anggota Kolegium Kesehatan Indonesia Pengganti Antarwaktu ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam





PEMERINTAH KOTA BAUBAU MENGUCAPKAN



2025

SELAMAT MERAYAKAN NATAL DAN TAHUN BARU 2025



Dr. H. MUH. RASMAN MANAFI, S.P., M.Si
Pj. Walikota Baubau



N. REFFIANI DWIATMO RASMAN, S.T
Ketua TP PPK Baubau



LA ODE ASWAD, S.Sos, M.Si
Pj Sekda Kota Baubau



H. ANDI HAMZAH MACHMUD, S.Sos, M.Si
Kadis Kominfo Baubau

Baubau Post

Kritik, Lugas, Independen

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
Redpel : Hengky TA
Korlip : Hengky T.A
Redaktur : Alyakin, Kasrun
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

Layouter : Rlirin
Pracetak : Aditya
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika
Komisaris : Erna Agule
Direktur Utama : Andina Latief, SKM
Manager Keuangan : Nabila D.A
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
Kepala Sirkulasi : Jamal
Administrasi : Salvana
Security :

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Kepala Biro Wakatobi : Risman
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
Kepala Biro Buton : Rahman
Kepala Biro Busel : Salvana
Kepala Biro Buteng : Andini
Kepala Biro Bombana :
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
Agen Pasarwajo :
Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Setahun Mangkrak, Firli Bahuri Akan Diperiksa Kasus SYL Pekan Depan



Eks Ketua KPK Firli Bahuri akan diperiksa pekan depan.

Pewarta: Alwan

JAKARTA- Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Ketua KPK, Firli Bahuri terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada pekan depan.

Pemeriksaan terhadap Firli ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa.

"Untuk rencana tindak lanjut penyidikan dalam penanganan perkara aquo, telah diagendakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka FB pada minggu depan," kata Direktur Reskrim-

sus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (22/11).

Kendati demikian, Ade Safri belum membeberkan secara pasti kapan pemeriksaan akan dilakukan. Ia hanya menyebut surat panggilan telah dilayangkan oleh penyidik pada Rabu (20/11) lalu.

"Nanti kita update, yang jelas minggu depan. Surat panggilan terhadap tersangka FB sudah dikirimkan oleh penyidik," ujarnya.

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023.

Dalam kasus ini,

penyidikan jenderal bintang tiga Polri itu diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, setahun berstatus tersangka, tak ada perkembangan berarti dalam proses penyidikan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Penyidik tercatat dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan dua kali pula dikembalikan karena dinilai belum lengkap.

Pada Februari lalu, Firli tercatat sempat

kembali dipanggil untuk diperiksa guna melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Namun, dua kali ia tak hadir.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kini digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran tak kunjung merampungkan kasus tersebut.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan terdaftar dengan nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. (*)

anggota Propam. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan menyebut alasan pihaknya tak memborgol Dadang adalah sebuah trik.

"Jadi terkait dengan foto yang beredar itu ya memang trik-trik atau cara-cara pemeriksaan, ini kan banyak caranya," kata Dwi saat dihubungi, Jumat (22/11).

Dwi menyebut saat itu Dadang dalam kondisi gangguan mental. Karenanya, kata Dwi, perlu dilakukan cara-cara khusus agar Dadang mau mengakui per-

Habiburokhman dan Sahroni Protes Keras: AKP Dadang Harusnya Diborgol



Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar.

Laporan: Hadi

JAKARTA-Komisi III DPR mengkritik standar penanganan Divisi Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Riyanto Anshari.

Ketua Komisi III Habiburokhman menyayangkan pelaku penembakan AKP Dadang Iskandar yang merupakan Kabag Ops Polres Solok Selatan tak diborgol selama pemeriksaan.

"Kami juga menyayangkan standar yang diterapkan propam setempat.

buatan yang dilakukannya.

"Kita saat ini menghadapi anggota yang sedang gangguan mental begitu, sehingga kalau kita nanti pakai dengan kekerasan tentu dia nanti enggak akan terbuka, jadi kita baik-baikin supaya dia terus terang bicaranya begitu," ucap dia.

Lebih lanjut, Dwi menegaskan pihaknya tak memberikan perlakuan khusus terhadap Dadang selama proses pemeriksaan.

"Enggak ada (perlakuan khusus). Jadi terkait foto-foto yang beredar itu ya itu pada saat pemeriksaan ya itu upaya-upaya supaya pelaku ini mengaku, benar-benar terbuka, jadi ya kita baik-baikin dulu begitulah kira-kira," tutur Dwi.

Kami lihat seorang tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan," kata Habib dalam konferensi pers, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

Habib juga mengaku melihat suatu video yang justru menunjukkan Dadang berjalan didampingi selayaknya pejabat kepolisian.

Ia pun meminta Propam terkait untuk dievaluasi.

"Harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrem," ucapnya.

Hal serupa juga

disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Ia menyatakan sebagai terduga pelaku, seharusnya Dadang diborgol.

Dalam unggahan di Instagramnya @ahmadsahroni88, ia membagikan sejumlah video yang menunjukkan Dadang tak diborgol.

"Ini Anggota Propam wajib dievaluasi, terjadi dugaan pembunuhan tapi yang diduga pelaku malah diperlakukan seperti tidak ada apa-apa, mustinya langsung diborgol," tulis Sahroni dalam Instagramnya. (*)

gaku melihat suatu video yang justru menunjukkan Dadang berjalan didampingi selayaknya pejabat kepolisian. Ia pun meminta Propam terkait untuk dievaluasi.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. Ia menyatakan sebagai terduga pelaku, seharusnya Dadang diborgol.

Dalam unggahan di Instagramnya @ahmadsahroni88, ia membagikan sejumlah video yang menunjukkan Dadang tak diborgol.

"Ini Anggota Propam wajib dievaluasi, terjadi dugaan pembunuhan tapi yang diduga pelaku malah diperlakukan seperti tidak ada apa-apa, mestinya langsung diborgol," tulis Sahroni dalam Instagramnya. (*)

AKP Dadang Tak Diborgol Karena Alasan Gangguan Mental



Polda Sumbar buka suara soal polisi penembak AKP Ulil di Solok Selatan tidak diborgol.

Laporan: Hamid

JAKARTA-Polda Sumatera Barat (Sumbar) buka suara atas kritikan Komisi

III DPR terhadap anggota Propam dalam menangani kasus penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP

Ulil Riyanto Anshari. Kritik itu dilayangkan lantaran Kabag Ops AKP Dadang Iskandar tak diborgol saat diperiksa oleh

Kementerian Komdigi Sahuti Penyediaan Infrastruktur Akses Internet, BAKTI Bangun RTGS Satelit Satria-1 Pada 18 Titik di Baubau

BAUBAU, BP-Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi Informasi dan Digital dalam waktu dekat akan membangun Satelit Satria-1 di Baubau sebagai tindak lanjut permohonan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Baubau untuk mewujudkan target Baubau 2026 zero blankspot dan sinyal lemah sehingga dapat tercipta pemerataan layanan akses internet kepada masyarakat, dimana hal ini diwujudkan dengan penyediaan infrastruktur akses internet di wilayah Kota Baubau yg d mulai pembangunanya Tahun 2024.

Kadis Kominfo Kota Baubau H Andi Hamzah Machmud, S.Sos, M.Si, mewakili Pj Wali Kota Baubau dalam keterangan persnya Sabtu (23/11/2024) membenarkan rencana BAKTI yang akan membangun RTGS Satelit Satria-1 di Baubau. Bahkan, BAKTI secara resmi kelembagaannya sudah menyampaikan hal itu melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kominfo Kota Baubau perihal Pelaksanaan Pekerjaan Sewa Layanan Perangkat VSAT Remote Terminal Ground Segment Sebagai User Terminal SATRIA-1 Akses Internet.

Menurut H Andi Hamzah Machmud, dalam surat yang ditandatangani Plt Direktur Infrastruktur Darien Aldiano, BAKTI telah menunjuk PT Parimas Hicindo Sentosa (teknologi iDirect) & KSO JTU-TMSI (Teknologi HNS) sebagai penyedia untuk melaksanakan pekerjaan pada 18 titik lokasi di Kota Baubau yakni 12 titik untuk teknologi iDirect pada lokasi RA Jannatul Firdaus, MI Swasta Al Hikmah, MI Swasta Azzikir, MI Swasta AL Jaariyah,

MI Swasta Jabal Nur Liabuku, MI Negeri 2 Baubau, RA An-Nasar, RA AL Ikhlas, RA Azzikir, RA AL-Hikmah, RA Firdaus dan RA Al Iman, sedangkan 6 titik teknologi HNS pada lokasi RA A Arabiyah, RA Arrasyid, RA Fastabuqul Khaeat, RA Alhaq, RA Al Amin, RA Baitul Hidayah.

Hanya saja dalam surat BAKTI tersebut mensyaratkan jika terdapat kondisi pada lokasi-lokasi seperti mendapatkan penolakan dari pihak yang berwenang di lokasi, telah tersedia layanan internet (BAKTI AKSI dan/atau internet mandiri), tidak masuk dalam kriteria wilayah yang dapat disediakan pekerjaan berdasarkan kondisi operasional, kondisi keamanan, kondisi kelistrikan, dan/atau kondisi lainnya yang berpengaruh terhadap penyediaan pekerjaan maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan pemindahan lokasi (relokasi) ke lokasi baru yang akan ditetapkan oleh BAKTI.

â€œ BAKTI meminta dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan tersebut agar Pemkot dan masyarakat Kota Baubau dapat mensupport dan bekerjasama dengan penyedia BAKTI sehingga pelaksanaan pekerjaan di lokasi yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana program dimaksud,â€ ungkap H Andi Hamzah Machmud.

Sementara itu, pada beberapa bulan sebelumnya juga pemerintah pusat telah merespon permohonan Pemkot Baubau dimana telah di bangun menara BTS di 3 wilayah Kota Baubau yakni 2 lokasi di Kecamatan Sorawolio dan 1 lokasi Kecamatan Bungli. Demikian pula dengan Pemerintah Provinsi juga telah mewujudkan permohonan Pemkot Baubau untuk pembangunan BTS melalui anggaran Pemprov Sultra Tahun 2024 yang saat ini dalam proses pembangunan di Kecamatan Lea-Lea.(*)

